



# PROSIDING

**LOKALATIH SINERGI PENYUSUNAN  
RPJMN 2020 - 2024 DAN RPJMD BIDANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**Novotel Hotel Bogor,  
25 - 28 November 2018**



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya atas selesainya penyusunan prosiding pelaksanaan Lokalatih Sinergi RPJMN dengan RPJMD bidang Perumahan dan Permukiman tanggal 25 sd 28 November 2018 di Hotel Novotel Bogor.

Seperti yang telah kita sadari, pesatnya laju urbanisasi di Indonesia berimplikasi pada besarnya kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau. Sesuai dengan mandat yang tertera pada UUD 1945 dan UU 1 Tahun 2011, negara bertanggung jawab atas penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak bagi rakyatnya. Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa instrumen kebijakan seperti rencana pembangunan baik dalam tingkat nasional maupun daerah berperan penting dalam menjamin hak warga negara.

Perlu diketahui bahwa saat ini ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang menyusun rancangankonokratikRPJMN2020-2024bidangperumahan dan permukiman. Penyusunan dokumen ini membutuhkan masukan dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Daerah yang menangani langsung tantangan penanganan perumahan dan permukiman di level Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam rangka hal tersebut, kita mengambil kesempatan yang baik ini untuk mensinergikan agenda pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat nasional dengan daerah, khususnya Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang melaksanakan Pilkada 2018 yang juga sedang dalam proses penyusunan RPJMD pasca Pilkada.

Upaya pencapaian target nasional tidak akan optimal bila tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi agenda pembangunan dalam rencana pembangunan nasional dan daerah sangat lah penting. Tidak hanya dalam dokumen perencanaan, namun kolaborasi dan koordinasi, baik secara vertikal dari pemerintah pusat ke daerah, dan secara horizontal di antara Organisasi Pemerintah Daerah itu sendiri juga perlu diperkuat. Selain itu, transformasi peran pemerintah dari yang hanya berperan sebagai pelaksana, perlu diperkaya dengan peran sebagai pemicu kontribusi dari berbagai pihak di luar pemerintah.

Tujuan dari Lokalatih adalah untuk menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, indikator serta kegiatan prioritas yang pada akhirnya akan membantu Pemerintah Daerah dalam mengukur seberapa besar kontribusi pembangunan yang telah dilakukan terhadap pencapaian pembangunan nasional. Lokalatih ini juga diselenggarakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam menerapkan Kerangka Kerja Logis (KKL) pada penyusunan RPJMD bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Semoga prosiding pelaksanaan Lokalatih Sinergi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD ini, dapat menjadi referensi berbagai pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2018

Tri Dewi Virgiyanti

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman

Kementerian PPN/Bappenas



Pada tahun 2018 telah diselenggarakan Pilkada serentak di berbagai wilayah Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Kepala Daerah terpilih mengemban amanat untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun sesuai dengan jangka waktu masa bakti mereka. Momen ini merupakan momen yang penting untuk penyelarasan antara RPJMD dengan RPJMN yang sesuai dengan kerangka SDGs sebagai arah pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil observasi terhadap RPJMD dan program di daerah, masih ada yang belum optimal dalam menangani isu perumahan dan permukiman kumuh di daerah. Berbagai tipologi dan karakteristik persoalan perumahan dan permukiman kumuh belum mendapatkan penanganan yang spesifik. Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah menurut UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan minimnya inovasi pemerintah daerah dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh.

Direktorat Perumahan dan Permukiman Bapennas melalui CCMU/Pokja PPAS, mendorong sinergi RPJMN dan RPJMD bidang perumahan dan permukiman melalui kegiatan LOKALATIH untuk OPD di daerah, untuk menjamin agenda Kota Tanpa Kumuh sesuai dengan target SDGs. Mengingat cakupan daerah yang baru menyelenggarakan Pilkada cukup banyak, Lokakarya dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu wilayah Timur dan wilayah Barat Indonesia. Lokalatih wilayah Barat diselenggarakan di Bogor selama 4 hari dari tanggal 25 sampai dengan 28 November 2018.

Lokalatih dibuka oleh DR Rudy Suprihadi Prawiradinata, Deputy Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam sambutannya menekankan pentingnya melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam proses-proses penataan kumuh dan memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih.

Ir Diah Indrajati, M.Sc sebagai Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, sebagai keynote speech menekankan arah pembangun di daerah yang tertuang dalam RPJMD harus sinkron dengan RPJMN dan merupakan proses analisis data. Draft rumusan RPJMD sebelum disahkan harus dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Dalam sambutan penutup Ir. Didiet Achdiat. MSC, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, mengharapkan proses dan hasil lokalatih selain meningkatkan kualitas perencanaan juga bisa menjadi ajang kolaborasi. Lebih jauh dikatakan bahwa, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, terbuka jika ada daerah yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut dalam memperkaya penyusunan RPJMD pasca lokalatih.

## **KOMPONEN LOKALATIH**

Materi yang dibahas di dalam Lokalatih terdiri dari kebijakan, penyusunan dan pemanfaatan data serta indikator perumahan dan permukiman, kerangka kerja logis, dan berbagi pengalaman kisah sukses Kebijakan, data dan indikator, kisah sukses menjadi input bagi praktek penyusunan Kerangka Kerja Logis (KKL) bidang perumahan dan permukiman yang menjadi bahan untuk perbaikan draft RPJMD.

## **NARASUMBER DAN FASILITATOR**

Narasumber adalah pejabat eselon 1, 2, 3, dan Fungsional Perencana dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN. Praktik baik mengambil kasus di Kota Bogor dengan narasumber Walikota Bogor. Sedangkan sesi penyusunan kerangka kerja logis difasilitasi oleh para tenaga ahli dari POKJA PPAS, KOTAKU, dan Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

## **PESERTA**

Peserta kegiatan loklatih terdiri dari perwakilan OPD (Bappeda, Dinas PKP, dan Dinas Pekerjaan Umum) di seluruh provinsi dan Kab/Kota wilayah Barat Indonesia, yang baru melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2018 dan sekaligus merupakan lokasi Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

## **TARGET KOMPETENSI PESERTA**

Target kompetensi yang dicapai oleh peserta setelah mengikuti Loklatih Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD terkait Bidang Perumahan dan Permukiman adalah:

1. Peserta memahami konsep dan konteks perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi
2. Peserta memahami isu strategis perumahan dan permukiman di tingkat nasional
3. Peserta memahami isu strategis dalam konteks lokal serta mampu menerjemahkan target nasional ke dalam RPJMD
4. Peserta memahami cara menyusun Kerangka Kerja Logis

# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR  | i  |
| RANGKUMAN LOKAKARYA   | ii |
| DAFTAR ISI  | iv |
| SATU-SAMBUTAN   | 1  |
| Sambutan Deputy Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas  | 2  |
| Keynote Speech, Dirjen Bangda Kementiran Dalam Negeri   | 3  |
| DUA-KEBIJAKAN   | 4  |
| High Level Discussion Sinergi RPJMN dan RPJMD antara Eselon II Pokja PPAS Nasional dan Kepala OPD       | 5  |
| Kebijakan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman  | 8  |
| Penyusunan dan Pemanfaatan Data serta Indikator dalam Penyelenggaraan PKP                               | 9  |
| TIGA - BERBAGI KISAH SUKSES   | 12 |
| Inovasi dan Strategi Kota Bogor dalam Melakukan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan | 13 |
| EMPAT-PELATIHAN KKL   | 14 |
| Pengantar Konsep Logframe   | 15 |
| Praktik Penyusunan KKL  | 16 |
| Presentasi KKL  | 16 |
| Pembaasan Narasumber  | 19 |
| Fasilitator & Co-Fasilitator KKL  | 21 |
| LIMA-PENUTUP  | 23 |
| Wrap-Up Lokakarya   | 24 |
| Sambutanmukiman Penutupan Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR                    | 25 |
| ENAM-LAMPIRAN   | 27 |



1 -  
**SAMBUTAN**



Ir. Rudy Suprihadi Prawiradinata  
Deputy Kewilayahan  
Kementerian PPN/BAPPENAS

*“Event ini sangat strategis untuk dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terwujud sinergi dan sinkronisasi dalam pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman,”*

- Rudy S Prawiradinata

## Sambutan Pembuka

Ir. Rudy Suprihadi Prawiradinata, PhD

Deputy Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas

Dalam sambutan pembukaan, Rudy S Prawiradinata, Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas, mengatakan bahwa kegiatan loklatih ini merupakan kesempatan yang baik untuk mensinergikan penyusunan RPJMD dengan RPJMN. Dalam kegiatan loklatih ini pemerintah pusat dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar RPJMD selaras dengan RPJMN, sebaliknya pemerintah daerah dapat memberikan umpan balik bagi penyusunan RPJMN 2020 – 2014.

Lebih jauh, Rudy, mengatakan bahwa perumahan dan permukiman merupakan sektor yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan sektor ini harus dilakukan bersamaan dan saling berkaitan. Perbaikan dan penyediaan perumahan di dalamnya terkait dengan penyediaan dan perbaikan kondisi air bersih dan sanitasi baik itu air limbah maupun persampahan.

Hal yang tidak boleh dilupakan juga berkaitan dengan perubahan perilaku. Berbicara mengenai sanitasi dan air bersih berkaitan erat dengan kebiasaan perilaku kita sehari – hari, demikian menurut Rudy. Perubahan perilaku sebaiknya dimulai dari diri kita sendiri, baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Rudy menegaskan bahwa sebagai aparatur pemerintah kita jangan hanya memberikan program kepada masyarakat tetapi kita sendiri tidak pernah melakukannya. Sedangkan berkaitan dengan perumahan harus diperhatikan keterkaitannya dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan budaya bukan hanya memperhatikan persoalan infrastruktur semata.

Pembangunan saat ini masih cenderung memprioritaskan hal lain seperti jalan, padahal air minum, sanitasi dan penyediaan rumah layak huni sangat penting. Pembangunan bidang perumahan dan permukiman merupakan investasi jangka panjang. Rudy berharap semua sektor ini bisa menjadi prioritas di dalam RPJMD dan RPJMN 2020 – 2014.

Sebagai penutup, Rudy menghimbau pemerintah pusat harus saling terbuka dalam memberikan masukan untuk perbaikan ke depan dan semoga loklatih ini menjadi sarana komunikasi yang baik dan berjalan dengan lancar.



Ir Diah Indrajati, M.Sc  
Direktur Jenderal Bina  
Pembangunan Daerah

*“Dalam penanganan isu perumahan dan permukiman, peran provinsi dan kab/kota yang kuat sangatlah diperlukan. Untuk itu diharapkan mulai saat ini seluruh pihak terkait bisa meningkatkan komitmen”*

- Diah Indrajati

## Keynote Speech

Ir Diah Indrajati, M.Sc

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Dalam sambutannya, Ir Diah Indrajati, M.Sc sebagai Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri menekankan arah pembangun di daerah yang tertuang dalam RPJMD harus sinkron dengan RPJMN. Pemerintah Kota/Kab perlu melakukan analisis permasalahan dan isu strategis yang tepat dan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi dan pusat secara berjenjang. Dalam kasus penyusunan RPJMD sudah hampir selesai, maka pemerintah daerah diharuskan memasukkan analisis dan data pada dokumen teknokratik terkait dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah provinsi/pusat. Sesuai dengan arah RPJMN yang mengacu pada pencapaian Indikator SDGs, program pemerintah daerah juga harus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi.

Pilkada serentak dalam periode waktu tertentu menguntungkan bagi berbagai pihak karena akan lebih mudah untuk penyelarasan dalam waktu yang sama. Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bappeda untuk bisa melakukan sinkronisasi yang lebih baik dengan SKPD. Berdasarkan pengalaman dokumen perencanaan 5 tahun dari Kepala daerah tidak sinkron dengan LPPD, sehingga tidak menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan. Peluang lain adalah adanya ruang bagi Bappeda untuk membuat Pokja Pokja Strategis, rumusan isu strategisnya dapat lebih fokus dan tajam. Dengan demikian diharapkan perencanaan di daerah akan lebih baik.

Lebih lanjut, Diah menyoroti kontribusi OPD dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam Permendagri no 78 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri memperkenalkan platform key planning, yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan kota/kabupaten serta provinsi. Platform ini diharapkan dapat menjadi menghasilkan perencanaan yang sinkron dengan tujuan pembangunan dan dapat lebih transparan. OPD dapat menyampaikan data dan isu strategis masing-masing kepada Bappeda. Dengan demikian secara umum peran OPD adalah untuk mengawal Bappeda.



# LOKALATIH BERGIGI PENYUSUNAN RPJMN 2020 - 2024 DAN RPJMD DAN PERUMAHAN DAN KAWASAPERUMAHAN PERMUKAAN



## 2- KEBIJAKAN



# High Level Discussion Sinergi RPJMN dan RPJMD antara Eselon II Pokja PPAS Nasional dan Kepala OPD



Eko D Heripoerwanto

Direktur Perencanaan  
Pembiayaan Perumahan.  
Kementerian PUPR

*“Pemerintah daerah harus menciptakan iklim yang kondusif untuk dunia usaha agar dapat berkontribusi dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”*

- Eko D Heripoerwanto

High-level discussion dikemas dalam format talkshow dengan narasumber Tri Dewi Virgiyanti sebagai Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/ Bappenas, Ibu Zanaryah sebagai Direktur SUPD II, Kemendagri, Dwityo Akoro sebagai Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Heri Eko Purwanto sebagai Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Didit sebagai Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR dan Ruminah sebagai Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Potensi Objek Konsolidasi Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Wiwiet Heris bertindak sebagai moderator dalam talkshow.

Pada sesi ini, Wiwiet Heris membuka dialog dengan menyampaikan sebuah pertanyaan besar, yaitu: “Mengapa masih banyak rumah tangga di Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni?”.

Selanjutnya Virgi sebagai perwakilan dari Bappenas memberikan pengantar mengenai capaian-capaian nasional dalam perumahan dan permukiman sesuai dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah ditetapkan. Harapannya, capaian ini nantinya akan ditingkatkan dari standar layak menjadi standar aman. Disadari bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah arus urbanisasi yang terus meningkat, sehingga peningkatan kebutuhan akan perumahan di perkotaan perlu menjadi perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Dwityo Akoro dari Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR menyampaikan bahwa yang tidak kalah penting adalah adanya regulasi mengenai standar pelayanan minimal (SPM) yang perlu ditegakkan. Hal tersebut membutuhkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik di tingkat pusat ataupun daerah juga adanya sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Maka dari itu, peran Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS) nasional dan di daerah menjadi vital dalam rangka mensinergikan semua OPD dan bersama memetakan isu strategis yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya yang tidak kalah penting khususnya memantapkan penyusunan dokumen rencana, baik RPJMD, dan selanjutnya rencana sektoral yaitu RP3KP untuk 20 tahun mendatang. Dwityo mengatakan, bahwa dokumen rencana tersebut meliputi tiga sifat



Ruminah Tarmizi

Kepala Subdit Perencanaan  
dan Obyek Konsolidasi Tanah.

Kementerian ATR/BPN

*“Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan penyediaan lahan yaitu pembebasan lahan langsung dari pemerintah dan kedua dengan konsolidasi tanah dari warga”*

- Ruminah Tarmizi



Dwityo Akoro

Direktur Perencanaan  
Penyediaan Perumahan.  
Kementerian PUPR

utama, yaitu: multi years planning, multi source of funding, dan multi stakeholders.

Perihal RPJMD, Zanariyah memaparkan bahwa dokumen rencana yang sah yang dimandatkan daerah dari Kemendagri adalah RPJMD. RPJMD ini wajib disusun pasca pilkada, yang tahun ini diselenggarakan di 17 provinsi. Zanariyah menyampaikan, bahwa Kemendagri akan memantau penyusunan RPJMD tersebut ke daerah-daerah. Dalam pemantauannya, Kemendagri telah membentuk Pokja terkait agar mempermudah proses pemantauan. Beliau menekankan bahwa, Kepala OPD terkait perumahan dan permukiman harus dapat memandatkan isu strategis terkait ke dalam RPJMD, agar selanjutnya dapat dianggarkan ke daerah. Karena, jika tidak ada di dokumen rencana, maka mutlak tidak akan ada di APBD. Saat ini, Kemendagri sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai PUPK yang harapannya setelah RPP tersebut disahkan, akan dapat memperjelas urusan di daerah. Selain itu disampaikan juga bahwa Kemendagri telah mencanangkan aplikasi yang berguna sebagai database penyusunan RPJMD dan Renstra, sehingga penyusunan dokumen tersebut akan mudah dipantau dari pusat dan sebaliknya bila daerah menghadapi kendala.

Selain pada sisi top-down dari pemerintah terkait kebijakan dan regulasi, sisi permintaan atau terhadap perumahan dari masyarakat juga perlu untuk diperhatikan. Wiwit kemudian menanyakan mengenai hal tersebut kepada Heri Eko dari Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, mengenai bagaimana pemerintah dapat membantu Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dalam mengakses rumah yang layak?

Heri Eko menjelaskan bahwa pada sisi permintaan, ada aktor lain dari pembiayaan perumahan yang cukup berperan besar, yaitu sektor private atau pengembang. Selanjutnya menurut Heri Eko, bila pengembang dapat mematuhi peraturan hunian berimbang yakni perbandingan rumah mewah:menengah:sederhana sebesar 1:2:3, maka urusan perumahan untuk MBR akan sangat terbantu. Maka dari itu, Heri Eko menyampaikan bahwa registrasi pengembang saat ini diwajibkan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR 24/2018 selain untuk fungsi memantau, tetapi juga untuk melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya, Pokja PPAS di daerah dapat berperan dalam mengawasi hal tersebut.

Ruminah dari Kementerian ATR menjelaskan bahwa okupansi masyarakat yang tinggal di tanah tersebut memang sampai saat ini masih belum bisa di-'legal'-kan, dalam artian belum dapat dimiliki secara sah. Namun demikian, Kementerian ATR telah ikut menyusun Perpres terkait reforma agraria yang di dalamnya mengatur mengenai redistribusi lahan pertanian dan non pertanian yang memungkinkan adanya pemberian sertifikat tanah. Lebih lanjut, Ruminah menyatakan bahwa Kementerian ATR sedang mempersiapkan metode konsolidasi tanah yang sedang disusun Permennya agar dapat menjadi solusi dan strategi lain mengenai penyediaan lahan untuk perumahan dan permukiman. Konsolidasi tanah disebutkan sebagai peluang masyarakat agar dapat berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas lingkungan hunian. Kemudian, land banking juga akan dilakukan ke depannya.

*“Dalam menangani isu perumahan dan permukiman, dibutuhkan perencanaan yang matang. Salah satu langkah efektif yang bisa dilakukan daerah adalah dengan menyusun RP3KP”*

- Dwityo A Soeranto



Zanariyah

Direktur SUPD II. Kementerian Dalam Negeri

*“Seluruh OPD harus saling bergandengan tangan dalam menetapkan isu strategis perumahan dan permukiman, sehingga tertulis di RPJMD dan dianggarkan di APBD,”*

- Zanariyah

Diskusi berlanjut pada penanganan kumuh yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Didit, sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya menyampaikan kolaborasi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Namun, untuk mencapai kota tanpa kumuh sepenuhnya, selain dari sudah yang dipaparkan sebelumnya, Didit menambahkan perlu ada pendataan yang aktual baik dalam hal pemetaan permukiman kumuh, juga demografi penduduknya. Data tersebut dapat diterjemahkan ke dalam RPJMD, RTRW, dan dokumen rencana lainnya agar program dan kegiatan lebih tepat sasaran. Selain itu juga, permasalahan kumuh tidak akan selesai dengan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga dengan menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonominya. Maka dari itu, pelibatan masyarakat adalah penting, sehingga harus terjadi perubahan perilaku.

Pada penutup acara, Wiwit menyimpulkan beberapa hal yang menjadi poin utama dari diskusi tersebut yaitu masih adanya tantangan pemenuhan target SDGs, perencanaan yang didukung dengan data itu kunci dalam penanganan perumahan dan permukiman, dan masih banyak opsi dan ruang yang dapat dilakukan oleh OPD terkait dalam menangani isu ini.



Didiet Arif Akhdat

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman. Kementerian PUPR

*“Permasalahan kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi”*

- Didiet Arif Akhdat



Tri Dwi Virgiyanti

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman. Kementerian PPN/BAPPENAS

*“Penyediaan rumah layak dan terjangkau harus sejalan dengan arus urbanisasi yang terus meningkat”*

- Tri Dwi Virgiyanti

# Kebijakan Dasar

Nurul Wajah Mujahid

Kasubdit Perumahan Direktorat Perrumahan dan Permukiman  
Kementrian PPN/Bappenas



Nurul Wajah Mujahid

Kasubdit Perumahan Direktorat  
Perrumahan dan Permukiman

*“Pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman mutlak untuk ditingkatkan, karena turut menyumbang 70% angka stunting di Indonesait”*

- Nurul Wajah Mujahid

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, berbagai kegiatan individu dan keluarga dilakukan di rumah mulai dari kelahiran dan berbagai kegiatan lainnya. Kenyataannya dua dari tiga orang Indonesia menempati rumah yang tidak layak huni, padahal perumahan dan permukiman yang layak merupakan prasyarat terciptanya sumber daya manusia yang sehat lahir dan bathin.

Alokasi anggaran pemerintah untuk perumahan hanya 3%, lebih kecil jika dibandingkan dengan pendidikan (20%) dan kesehatan (5%), padahal ketiganya merupakan kebutuhan dasar. Akses terhadap rumah yang layak merupakan Hak Azasi Manusia seperti yang tertuang di dalam pasal 28 UUD 1945; Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; European Social Charter; dan African Charter on Human and Peoples' Rights. Pada kesepakatan global SDGs dimana Indonesia ikut di dalamnya akses perumahan layak masuk ke dalam indikator 11.1

Beberapa karakteristik dari rumah secara umum merupakan tempat yang bisa diwariskan, pemenuhannya perlu waktu yang lama, perlu investasi besar, perlu lahan yang besar, dan tahan lama. Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan akan perumahan, masyarakat menghadapi adanya benturan antara keinginan, kebutuhan, dan kemampuan. Secara umum hal ini yang membuat preferensi dan hasil dari produk perumahan selalu berbeda-beda. Contoh dari isu-isu terkait perumahan yang terjadi saat ini rumah yang layak tapi tidak terjangkau, rumah terjangkau tapi tidak layak, tidak adanya kontrol terhadap pembangunan perumahan swadaya, generasi milenial sulit mempunyai rumah, perumahan MBR makin menjauh dari pusat kota.

Perumahan memberikan kontribusi yang berarti pada sektor perekonomian : (1) backward dan forward linkages sangat luas (135 item) dari industri material sampai industri furniture; (2) melibatkan tenaga kerja yang cukup besar; (3) mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Perlu adanya kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tepat. Kebijakan yang sesuai dengan standar SDGs akan mendorong terciptanya hunian yang layak dan terjangkau, lingkungan dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak, dan kepastian bermukim sebagai faktor-faktor yang esensial dalam permukiman. Karenanya akan dilakukan pergeseran target dan indikator dari backlog menjadi target SDGs, y

Berdasarkan capaian pembangunan indikator perumahan dan permukiman yang layak saat ini provinsi peserta lokalatih, peserta dapat menyusun strategi untuk menjawab tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk wilayah yang berbeda, mengingat masalah perumahan memiliki unsur subjektifitas yang tinggi.

# Penyusunan dan Pemanfaatan Data Serta Indikator dalam Penyelenggaraan PKP



Iwan Kurniawan

Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri

*“Aplikasi SIPD merupakan inovasi pendataan yang dapat digunakan dalam analisis data, menyusun perencanaan dan digunakan untuk monev”*

- Iwan Kurniawan

## Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)

Iwan Kurniawan selaku Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri

Iwan Kurniawan dari menjelaskan bahwa SIPD diimplementasikan berdasarkan amanat UU 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam perencanaan, segala permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi hingga program dan kegiatan harus disusun dengan berbasis data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan SIPD akan membantu pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, termasuk menjadi alat bantu dalam evaluasi pencapaian pembangunan daerah. SIPD dibagi menjadi banyak bentuk, seperti e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, dan e-reporting yang seluruhnya saling terhubung.

Sejak tahun 2017, Kemendagri mengupayakan agar penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan dengan berbasis pada e-planning sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017. Pengelola e-planning adalah Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sekaligus admin e-planning. Sedangkan Kepala Perangkat Daerah berperan selaku penyusun dokumen rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah sekaligus pengguna e-planning itu sendiri. E-planning sendiri wajib terhubung dengan e-database. Namun apabila data yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah tidak ada dalam e-database, maka pemerintah daerah dapat menggunakan data dan informasi di luar e-database asalkan sumber dan metode pengumpulan datanya valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas Kementerian Dalam Negeri kemudian adalah melakukan konsultasi rancangan awal RPJMD kepada seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kab/kota, kemudian melihat kesinambungannya dalam e-planning tersebut. Hal-hal yang akan ditinjau adalah kesesuaian rumusan isu, target, kebijakan, program, serta kegiatan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah berdasarkan data yang dimiliki dan juga kesinambungannya dengan arahan kebijakan nasional. Terkait hal ini, Iwan Kurniawan menekankan agar program dan kegiatan yang disusun oleh pemda harus berasal dari analisis data yang kuat, temukan akar persoalannya, kemudian bagaimana program/kegiatan dalam RPJMD akan menjawab arah kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMN.



Ira Lubis

Fungsional Perencana Subdit Perumahan. Kementerian PPN/ BAPPENAS

*"Pada 2030, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 0% kumuh. Ada 4 indikator yang harus dipenuhi dalam rumah layak huni yaitu luas bangunan, fisik bangunan, ketahanan bangunan dan akses air minum & sanitasi"*

- Ira Lubis



Aisyah Nasution

Fungsional Perencana Subdit Air Minum. Kementerian PPN/ BAPPENAS

Selama satu tahun keberjalanannya, terdapat beberapa evaluasi dalam penggunaan e-planning. Beberapa diantaranya adalah aplikasi yang masih belum terstandarisasi sehingga menjadi hambatan dalam upaya integrasi perencanaan pembangunan dari level kab/kota, provinsi, hingga nasional. Selain itu, aplikasi juga tidak terintegrasi dengan e-musrenbang dan juga KRISNA yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sebagai solusi sementara, Kemendagri kemudian memberlakukan persyaratan minimal yang perlu ada dalam e-planning untuk mengatasi kendala standard yang masih berbeda-beda tersebut.

#### Data dan Indikator Pembangunan PKP dalam Sustainable Development Goals (SDGs)

Ira Lubis - Fungsional Perencana Subdit Perumahan, Nur Aisyah Nasution - Fungsional Perencana Subdit Air Minum, Aldy Mardikanto - Fungsional Perencana Subdit Sanitasi Kementerian PPN/Bappenas

Ditetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs) secara global mau tidak mau akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. Artinya, integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah mutlak dilakukan. Untuk Indonesia sendiri, pengarusutamaan SDGs ke dalam rencana pembangunan telah dilakukan sejak RPJMN 2015-2019 dimana 57% dari 169 indikator SDGs telah diintegrasikan. Dalam arahannya mengenai penyusunan RPJMN 2020-2024 yang akan disusun, Menteri PPN atau Kepala Bappenas mengamanatkan agar 169 indikator SDGs dapat terintegrasi ke dalamnya.

Ira Lubis, Fungsional Perencana dari Subdit Perumahan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa dalam melaksanakan SDGs seluruh program/kegiatan harus disusun berdasarkan Result Chain, yaitu teori perubahan untuk menunjukkan bagaimana sebuah program akan memicu perubahan dari kegiatan menjadi dampak. Dimulai dari input sampai outcome. Result chain ini dibutuhkan untuk mengukur akuntabilitas. Terkait dengan sektor perumahan, dalam paparannya Ira Lubis juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi perubahan konsep perhitungan dari MDGs ke SDGs, seperti contohnya dalam perhitungan Rumah Layak Huni. Biasanya rumah layak huni diukur menggunakan pembobotan 4 komponen, yaitu Luas Lantai Per Kapita, jenis material bangunan (atap, lantai, dan dinding), akses air minum, dan akses sanitasi, namun dalam SDGs, rumah layak huni tidak lagi diukur menggunakan pembobotan komponen-komponen tersebut, melainkan seluruh komponen harus terpenuhi mutlak 100%. Jadi jika salah satu komponen tidak layak, maka rumah tersebut gugur dinyatakan sebagai rumah layak huni.

Pergeseran indikator dari MDGs ke SDGs tersebut bukanlah tanpa konsekuensi. Ira Lubis menjelaskan bahwa setelah mengolah data Susenas 2017 dengan menggunakan konsep tersebut, ternyata hanya kurang lebih 34% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap rumah tangga. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh elemen pemerintah daerah agar dapat melakukan penyesuaian terhadap program/kegiatannya agar dapat mencapai indikator SDGs nasional yang telah ditetapkan.

*“Dalam sektor air minum, perbedaan mendasar dari target MDGs dan SDGs adalah dari sisi kualitas. Berdasarkan SDGs sektor air minum, pada 2030 mendatang seluruh air perpipaan harus sudah siap minum, sama seperti negara maju”*

*-Aisyah Nasution*



**Aldy Mardikanto**

Fungsional Perencana Subdit Sanitasi. Kementerian PPN/ BAPPENAS

*“Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia baru sekitar 300 kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Dan dari 300 yang ada, baru 10% yang IPLT nya berjalan dengan baik”*

*-Aldy Mardikanto*

Terkait dengan sektor air minum, sesuai dengan mandat SDGs, target yang ditetapkan di Indonesia adalah akses air minum yang aman. Aman didefinisikan bahwa air perpipaan sudah siap diminum sesuai dengan standard negara maju. Nur Aisyah Nasution, Fungsional Perencana dari Subdit Air Minum Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih berada dalam masa transisi. RPJMN 2015-2019 masih bernafaskan MDGs, begitu pula dengan program dan kegiatannya. Dalam penyusunan RPJMN 2020-2024, maka seharusnya sudah mulai bergeser menuju SDGs.

Menanggapi banyak pertanyaan mengenai penggunaan istilah air minum atau air bersih, Nur Aisyah menekankan bahwa istilah yang digunakan adalah air minum yang didefinisikan sebagai air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk mandi, masak, minum, mencuci, peturasan, dan juga ibadah. Meskipun dalam Goal 6 SDGs disebutkan istilah clean water atau diterjemahkan sebagai air bersih, namun dalam goals 6.1 disebutkan khusus mengenai drinking water atau air minum. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi penggunaan istilah air bersih di dokumen-dokumen perencanaan baik di pusat maupun daerah.

Dalam indikator SDGs nasional terkait air minum yang telah disepakati, kepemilikan akses terhadap air minum diukur berdasarkan jenis sumber air minum utama dan jarak sumber air minum ke penampungan kotoran/limbah >10m. Jika sumber air minum utama tidak terlindungi atau sumber air minum utama terlindungi namun jarak ke penampungan kotoran/limbah <10 m maka rumah tangga disebut tidak memiliki akses terhadap air minum layak. Begitu pula jika sumber air minum utamanya adalah air kemasan maka disebut tidak memiliki akses terhadap air minum layak. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) masuk ke dalam kategori beverages disamakan dengan Coca Cola dan sejenisnya sehingga menjadi salah satu alasan mengapa AMDK tidak termasuk ke dalam kategori memiliki akses terhadap air minum.

Terkait dengan sektor sanitasi, Aldy Mardikanto, Fungsional Perencana Subdit Sanitasi Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa target SDGs yang ingin dicapai adalah Safely Managed Sanitation atau akses aman dan layak. Kejaran akses dasar hanya berlaku khusus untuk wilayah perdesaan. Akses sanitasi aman diartikan apabila pengguna fasilitas sanitasi adalah rumah tangga sendiri, bangunan atas menggunakan leher angsa, dan bangunan bawah menggunakan septic tank (yang disedot setidaknya sekali dalam jangka waktu tertentu), serta terhubung dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Sedangkan akses sanitasi dasar didefinisikan apabila pengguna fasilitas sanitasi adalah rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu, bangunan atas menggunakan leher angsa/plengsengan, dan bangunan bawah masih menggunakan lubang tanah. Hal yang tidak kalah penting dan mendasar dalam sanitasi adalah bagaimana menjadikan seluruh penduduk Indonesia dapat Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dalam mencapai Stop BABS tersebut, bagian infrastruktur sanitasi Bappeda harus dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan bidang sosial yang menangani kesehatan untuk dapat melakukan pemecuan perilaku. Hal tersebut menjadi penting karena pembangunan infrastruktur sanitasi akan percuma tanpa diawali dengan adanya perubahan perilaku masyarakat.



## Berbagi Cerita Sukses

Inovasi dan Strategi Kota Bogor dalam Melakukan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan

Bima Arya - Walikota Bogor



Bima Arya

Walikota Bogor

*“Membangun kota itu harus dengan gagasan, bukan karena kepentingan politik, ekonomi atau persekongkolan dengan pengusaha. Beautifikasi permukiman kumuh yang kami jalankan bukan sekedar mempercantik lingkungannya, namun juga merubah prilaku masyarakat menjadi lebih sehat”*

- Bima Arya

Bima Arya membuka sesi dengan menayangkan video campaign yang menampilkan para PNS Pemerintah Kota Bogor berkerja dengan tampilan yang unik. Selanjutnya menjelaskan bahwa program kota harus digiring dengan ide-ide cemerlang, tidak dengan kepentingan politik. Sehingga, dibutuhkan political will yang kuat dari Kepala Daerah untuk menangani isu strategis di daerahnya masing-masing.

Salah satu hal yang menjadi tantangan bagi para Pemimpin Daerah adalah fenomena “Quick Wins”. Ketika melakukan kampanye, para calon Pemimpin Daerah menawarkan rancangan program-program yang akan dilakukan apabila mereka terpilih. Jika konsep program tersebut sejalan dengan rancangan daerah dan memiliki pondasi yang kuat, maka dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila program tersebut memiliki pondasi yang lemah, tidak akan membuahkan hasil apa-apa.

Sebuah kota perlu menerapkan identitas, yakni menetapkan ke arah mana kota tersebut akan dibangun. Kota Bogor sendiri memiliki 3 identitas kota, yaitu Bogor Kota Pusaka (Heritage City), Bogor Kota Hijau (Green City), dan Bogor Kota Cerdas (Smart City). Sehingga di saat menyusun APBD, program-program tersebut harus sesuai dengan identitas kota.

Bima Arya melanjutkan sesi dengan memaparkan program-program Pemerintah Kota Bogor yang terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, seperti KOTAKU, Bank Sampah, dan lainnya. Saat ini, Kota Bogor fokus untuk meningkatkan kualitas air. Dari 120 km panjang perpipaan yang ada di Kota Bogor, baru sekitar 30 km perpipaan yang diganti. Pemerintah Kota Bogor perlu mencari bantuan dana untuk mengganti saluran-perpipaan tersebut. Pemerintah Kota Bogor sudah mendapatkan bantuan dari World Bank, namun perlu juga untuk mengakses bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk mendukung program terkait persampahan, per tanggal 1 Desember 2018, pemerintah Kota Bogor akan menerapkan Perwali terkait larangan penggunaan kantong plastik dalam berbelanja di toko modern. Menurut data, dari 650 ton sampah per hari, 5%nya adalah sampah kantong kresek. Kemudian, jumlah sampah plastik dari toko modern adalah sebesar 1,7 ton.

Bima Arya juga bercerita bahwa saat ini Kota Bogor memiliki impian untuk menaturalisasi Ciliwung. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat yang membuang sampah dan limbah di kali Ciliwung. Oleh karena itu, Walikota Bogor membentuk satgas yang terdiri dari SKPD, tim dari kampus, dan corporate. Sumber pendanaan untuk program ini adalah APBD, mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi, dan juga corporate. Menurut Bima Arya, untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada, pemerintah harus turut serta turun ke lapangan agar mendapatkan jalan penyelesaian yang sesuai.



4 -  
**PELATIHAN KKL**



Agenda hari kedua adalah pelatihan penyusunan KKL untuk menyempurnakan draft RPJMD yang sudah disusun oleh masing-masing daerah peserta. Sesi hari pertama yang berkaitan dengan kebijakan nasional, penyelarasan data dan indikator SDGs serta pengalaman Kota Bogor menjadi masukan bagi penyusunan KKL masing - masing peserta. Pelatihan ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu (1) Pengantar KKL untuk mengenalkan konsep Logframe; (2) Praktek penyusunan KKL oleh peserta; dan (3) Presentasi hasil penyusunan KKL dengan tanggapan dari narasumber.

## Pengantar KKL - Konsep Logframe

Hendra Murtidjaya - Tim CCMU/Pokja PPAS



Hendra Murtidjaya

Tim CCMU/Pokja PPAS

Sesi pengenalan ini menjelaskan latar belakang dari pentingnya pendekatan logframe sebagai instrumen pengelolaan program di daerah. Logframe merupakan panduan yang menjelaskan justifikasi serta cara mengukur keberhasilan dari suatu intervensi program atau kegiatan. Selain itu, logframe juga berperan dalam mengidentifikasi faktor eksternal yang berpengaruh pada keberhasilan program atau kegiatan. Dalam lingkup RPJMD, logframe membantu pelaksana program dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, atau di seluruh tahapan manajemen program. Pada tahap penyusunan RPJMD, pendekatan logframe dapat membantu pemerintah daerah dalam tahap persiapan penyusunan, perancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan.

Lebih lanjut, Hendra juga menjelaskan tahapan penyusunan logframe, mulai dari analisis kondisi eksisting, analisis isu dan permasalahan, analisis solusi, analisis strategi dan logika intervensi, penyusunan indikator, identifikasi sumber dan alat verifikasi, serta penyusunan asumsi. Narasumber menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga hal yang mencirikan isu, yakni merupakan hal yang menjadi perhatian publik, menjadi arahan atau perintah dari atasan, serta terkait dengan target nasional sehingga harus diprioritaskan di daerah. Diskusi selanjutnya adalah terkait sudut pandang penyusunan logframe. Mengenai hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa sudut pandang dalam penyusunan logframe adalah sudut pandang pemerintah daerah dalam melihat persoalan di daerahnya. Namun dalam penyusunan intervensi, pemerintah daerah dapat menuliskan pihak yang sekiranya dapat diajak berkolaborasi, yaitu baik pemerintah pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya



## Praktek Penyusunan KKL

Peserta diajak untuk menganalisis isu strategis dengan menggunakan pohon masalah dan dituangkan ke dalam format Kerangka Kerja Logis (KKL). Tahapan analisis berdasarkan kepada studi kasus yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Kasus yang dibahas menggambarkan permasalahan kumuh di perkotaan dengan tipologi tanpa keamanan bermukim dan dengan keamanan bermukim.

Pada tahap pertama peserta ditugaskan untuk menganalisa permasalahan dan elaborasi isu strategis dengan menggunakan metode pohon masalah berdasarkan kepada kasus yang tersedia, di dalam kelompok. Peserta dari 31 pemerintah daerah dibagi ke dalam 13 kelompok, masing-masing kelompok didampingi oleh dua orang fasilitator. Peserta dari kota/kabupaten yang sama berada dalam satu kelompok, pada masing-masing kelompok terdiri dari dua atau tiga kota/kabupaten. Untuk memudahkan peserta dalam analisis, penyelenggara membekali peserta dengan kertas kecil yang berisi pilihan-pilihan kunci persoalan.

Setelah analisa pohon masalah selesai, masing-masing kelompok ditugaskan untuk menyusun alternatif solusi dari persoalan (isu strategis) yang muncul di tahap pertama. Solusi didetailkan ke dalam Kerangka Kerja Logis.

## Presentasi KKL dan Pembahasan

Hasil KKL yang sudah disusun sebelumnya dipresentasikan dalam pleno kelas. Mengingat keterbatasan waktu presentasi diwakili oleh 3 kelompok yaitu kabupaten Bogor, kota Tegal, dan kota Bandung. Hasil presentasi ditanggapi oleh Haryo, Kasubdit Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan; Natsir, Kasie Lingkungan Hunian Besar; dan Dhani .... PUPR..

### Kabupaten Bogor

Isu :

- Penghasilan masyarakat di kawasan kumuh terbatas
- Kurangnya pengetahuan masyarakat
- Anggota keluarga bertambah akibat kelahiran
- Permasalahan di rumah sewa

- Penurunan kualitas hunian di wilayah kumuh sehingga semakin kumuh
- Pertumbuhan rumah baru tidak terkendali
- Peran pemerintah yang tidak optimal seperti sistem informasi, dan monitoring evaluasi
- Perumahan dan permukiman kumuh belum tertangani
- Data yang tersedia belum komprehensif

#### Solusi :

- Sosialisasi peningkatan kualitas air minum layak
- HIMAM
- Penyediaan Air minum PDAM
- Sosialisasi sanitas
- SPAL DS?DT
- Kredit penyediaan jamban



## Kota Tegal

#### Isu utama :

- Penanganan perumahan dan permukiman kumuh belum tertangani karena (1) penurunan kualitas hunian; (2) munculnya pemukiman baru yang tidak terencana; dan (3) peran pemerintah belum optimal dalam penanganan kumuh.
- Penurunan kualitas hunian karena adanya penambahan anggota keluarga, sehingga dari sisi luasan rumah menjadi tidak layak
- Kualitas infrastruktur tidak layak
- Isu strategi (1) kawasan kumuh yang belum tertangani; (2) RTLH yang belum tertangani baik di luar maupun di dalam kawasan kumuh
- Kawasan 131,13 Ha yang belum tertangani 131,21 Ha
- RTLH yang belum tertangani 1754

#### KKL Kota Tegal :

- Keluaran berkurangnya luasan kawasan kumuh
- Mengentaskan kawasan kumuh melalui perbaikan jalan lingkungan, dan drainase
- Luasan kumuh yang ditangani 24,6 Ha
- Pembangunan RTLH
- Membangun jalan lingkungan 6000 m, drainase 5500 m dan 1500 unit rumah layak huni selama 5 tahun
- Kolaborasi dengan OPD (1) DPU untuk drainase perkotaan; (2) Dinkes untuk masalah jamban dan sanitasi; (3) PDAM untuk air minum; (4) DLH untuk persampahan ; (5) menggandeng swasta untuk semua bidang.
- Luas kumuh ditangani 24,6 kumuh
- Pembangunan MCK



## Kota Bandung

### Isu strategis :

- Keterbatasan lahan
- Faktor ekonomi masyarakat masih rendah
- Tidak ada skema kredit untuk pekerja informal
- Pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih kurang
- Pengelolaan lingkungan hidup
- Peran pemerintah kurang optimal

### KKL Kota Bandung:

- Tujuan: Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
- Taman kota yang tadinya parkir menjadi destinasi wisata
- Outcome: infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, diukur dari meningkatnya air dan deklivable city
- Keluaran 1: tersedianya rumah tinggal bergaya modern di Kota Bandung pada akhir tahun 2023 dari 64% pada tahun 2018 menjadi 96% pada tahun 2023.
- Keluaran 2: peningkatan cakupan air bersih: peningkatan cakupan PDAM dan prasarana air bersih komunal 76% (2018) 97% (2023)
- Keluaran 3: pengentasan kawasan kumuh, baseline kumuh tersebar di 121 kelurahan, sisa 2019 sebesar 300 ha: dari 900 ha (2018) menjadi 36 ha (2023);
- Pelibatan masyarakat dalam penanganan kumuh
- Monitoring
- Penanganan kumuh dengan revitalisasi kawasan kumuh menjadi hunian vertikal yang dilengkapi dengan prasarana penunjang
- Keluaran 4 : pengadaan hunian layak, pembangunan hunian vertikal 10.500 pada tahun 2018 dan target menjadi 75.000 pada tahun 2023. Terdiri dari rusunawa dan rumah deret. Pada tahun 2019 akan dibangun rumah deret di kawasan Tamansari
- Meluncurkan program PIPK yang merupakan program inovasi kewilayahan dengan dana 100 juta per RW.



# Tanggapan Narasumber

## Penanggap Pertama

R. Haryo Bekti Martoyoedo, ST, MSc. - Kasubdit Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Dit. Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR



**R. Haryo Bekti M, ST, MSc**

Kasubdit Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan, Dit. Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR

Sesi pengenalan ini menjelaskan latar belakang dari pentingnya pendekatan logframe sebagai instrumen pengelolaan program di daerah. Logframe merupakan panduan yang menjelaskan justifikasi serta cara mengukur keberhasilan dari suatu intervensi program atau kegiatan. Selain itu, logframe juga berperan dalam mengidentifikasi faktor eksternal yang berpengaruh pada keberhasilan program atau kegiatan. Dalam lingkup RPJMD, logframe membantu pelaksana program dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, atau di seluruh tahapan manajemen program. Pada tahap penyusunan RPJMD, pendekatan logframe dapat membantu pemerintah daerah dalam tahap persiapan penyusunan, perancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan.

Lebih lanjut, Hendra juga menjelaskan tahapan penyusunan logframe, mulai dari analisis kondisi eksisting, analisis isu dan permasalahan, analisis solusi, analisis strategi dan logika intervensi, penyusunan indikator, identifikasi sumber dan alat verifikasi, serta penyusunan asumsi. Narasumber menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga hal yang mencirikan isu, yakni merupakan hal yang menjadi perhatian publik, menjadi arahan atau perintah dari atasan, serta terkait dengan target nasional sehingga harus diprioritaskan di daerah. Diskusi selanjutnya adalah terkait sudut pandang penyusunan logframe. Mengenai hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa sudut pandang dalam penyusunan logframe adalah sudut pandang pemerintah daerah dalam melihat persoalan di daerahnya. Namun dalam penyusunan intervensi, pemerintah

## Penanggap Kedua

Natsir - Kasubdit Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian, Dit. Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR



**Natsir**

Kasubdit Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian, Dit. Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR

Permasalahan perumahan dan permukiman tidak akan selesai tanpa adanya kolaborasi dan kolaborasi harus melibatkan para pelaku di luar PKP. Permasalahan PKP tidak akan selesai apabila hanya ditangani oleh para pelaku PKP, oleh karena itu harus mengajak dinas-dinas lain yang akan mempengaruhi PKP, misalnya dinas kesehatan yang bisa mempengaruhi perilaku hidup sehat masyarakat. Saat kumuh sudah tuntas, masyarakat seharusnya dibina agar perilakunya terjaga dan memiliki kemampuan sehingga lingkungan hunian tidak kumuh kembali.

Penyelesaian kumuh harus mengacu kepada target SDGs yang menjadi target RPJMN 2020 - 2024. Diharapkan target tersebut juga menjadi target RPJMD, sehingga RPJMN dan RPJMD menjadi sinergis, dan pencapaian target bidang perumahan dan permukiman akan tercapai lebih cepat.

Data merupakan hal yang penting dan pendataan tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Dengan adanya data yang tepat jadi tahu masalah yang akan ditangani, dan solusi bisa disusun dengan berdasarkan pada data yang tepat.

Khusus untuk kota Bandung sebagai kota besar perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Agar hal ini terjadi perlu koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam kaitan dengan target penambahan unit rumah susun, perlu dipikirkan dengan cara apa target tersebut dapat tercapai. Sedangkan mengenai kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha, perlu diterjemahkan ke dalam Renstra Dinas, sehingga menjadi operasional tidak berhenti di RPJMN atau RPJMD saja. Pembiayaan didetailkan dari pusat berapa, KPBU berapa, dan BUMD berapa.



Ibu Dani

Kasubdit Perencanaan Teknis,  
Direktorat Pengembangan  
Kawasan Permukiman,  
Kementerian PUPR

### Penanggung Ketiga

Ibu Dani - Kasubdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR

Visi Kementerian PUPR 2030 adalah pemenuhan infrastruktur dasar permukiman. Hingga tahun 2024 harus dipastikan target-target yang sesuai dengan visi tersebut. Strategi dan prioritas harus diarahkan kepada lokasi dan infrastruktur apa saja yang harus ditangani dan disediakan. Artinya hal ini harus tertuang di dalam RPJMD. Selain itu perlu dipikirkan pula aspek kebencanaan di dalamnya, sehingga tercipta kota yang tangguh.

Permukiman kumuh, dianalogikan dengan kurangnya infrastruktur dasar. Harus beranjak kepada level yang lebih jauh, jangan berlama-lama di masalah kumuh. RPJMN yang akan datang harus sudah memikirkan lepas landas dan memikirkan strategi paska 2024.

Perkembangan perkotaan dan non perkotaan, keduanya harus sejalan beriringan. Dalam kaitan dengan perkembangan perkotaan, dibutuhkan standar kelayakan perkotaan. Untuk perdesaan, tujuannya melestarikan kearifan lokal, material, dan lain-lain melalui pemenuhan SPM terlebih dahulu.

Perlu keseimbangan antara kegiatan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya dalam penyediaan perumahan dan permukiman, untuk menuju kota yang layak huni dan desa yang lestari. Dibutuhkan infrastruktur yang dapat menghasilkan leverage untuk daerah, berkualitas, tepat waktu dan tepat biaya.

# Fasilitator dan Co-Fasilitator Pelatihan KKL



Hendra Murtidjaja



Damar Widiatmoko



Gustomi Rudiyanto



A Huseiyn Pasaribu



Dede Saefudin



Marnia Nes



Tiar Purba



Tomy Risqi



M Irin



Gadiza Zselamart



Tiara Anggita



Melda Magiafitri



Dwi Jayanti Ratnasari



Ridzki Januar Akbar



Firdha Fitria



M Yasak



Halimah Hannah



Jony Chandra



LOKALATIH  
SINERGI PENYUSUNAN RPJMN 2020 - 2024 DAN RPJMD  
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOVOTEL HOTEL | BOGOR, 25 - 28 NOVEMBER 2018



5 -

# PENUTUP



LOKALATIH  
SINERGI PENYUSUNAN RPJMN 2020 - 2024 DAN RPJMD  
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOVOTEL HOTEL | BOGOR, 25 - 28 NOVEMBER 2018

# Wrap-UP Lokakarya

Nurul Wajah Mujahid

Kasubdit Perumahan Direktorat Perrumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas

Sesi ini diawali dengan menampilkan hasil review lokalatih dari peserta yang merupakan kompilasi dari moodmeter dan tanggapan peserta terhadap substansi materi yang disajikan selama lokakarya. Dari data yang berhasil dihimpun 94% peserta berpendapat lokalatih ini menarik, dan seluruh peserta berpendapat materi lokalatih bermanfaat bagi mereka. Materi yang paling diminati adalah Berbagi Kisah Sukses dari Bima Arya, Walikota Bogor, dipilih oleh 30% peserta.

Selanjutnya Nurul Wajah mengingatkan kembali pada kebijakan pembangunan dan kawasan permukiman pada RPJPN 2005-2025 yaitu kota tanpa permukiman kumuh sesuai dengan target SDGs goal 11.1. Seluruh masyarakat harus terpenuhi kebutuhan bermukim pada rumah yang affordable, adequate, dan safe.

Saat ini masih menjadi pekerjaan besar untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah secara bertahap memiliki akses pada hunian yang layak, aman, dan terjangkau beserta dengan layanan infrastruktur dasarnya. Penyediaan perumahan mempunyai karakteristik berbeda dengan penyediaan infrastruktur dasar. Perumahan bisa dilakukan (dibangun) sendiri oleh masyarakat, dibangun pengembang lalu dibeli masyarakat, difasilitasi pemerintah atau tidak difasilitasi pemerintah, dibiayai oleh masyarakat dan lembaga keuangan. Sementara infrastruktur dasar dibangun dan didanai oleh pemerintah.

Hal di atas, menurut Nurul merupakan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penyediaan perumahan. Akibatnya pada kasus tertentu penyediaan perumahan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, Nurul mengambil contoh kasus di Mexico, tempat yang pernah dikunjunginya dimana ada sekitar 5 juta unit rumah yang dibangun tetapi tidak dihuni bahkan ditinggalkan.

Ada 3 tipologi yang harus dipertimbangkan di dalam penyediaan perumahan, yaitu (1) bagi mereka yang memerlukan perumahan dan permukiman baru, apakah harus sewa atau milik; (2) bagi mereka yang sudah mempunyai rumah tetapi tidak layak; dan (3) bagi masyarakat di permukiman kumuh. Penangannya harus memperhatikan tipologi penghasilan masyarakat. Pada desil 1-4 penanganan bisa dilakukan dengan renovasi rumah, peningkatan daerah kumuh, dan perumahan baru bersubsidi. Pada desil 5-8 dengan cara memberdayakan pasar, sedangkan pada desil 9-10 belum ada solusi yang bisa jadi terobosan.

Kompleksitas seperti di atas, menjadikan urusan penyediaan perumahan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dengan cara kolaborasi karena keberhasilan akan ditentukan oleh banyak pihak. Saat ini birokrasi fokus pada urusan sendiri-sendiri dengan fokus pada pencapaian output sehingga lupa pada outcome. Padahal pencapaian outcome merupakan hasil dari pencapaian beberapa output. Sehingga pemerintah sering terlambat untuk menyadari dinamika kebutuhan masyarakat. Akibatnya uang habis dibelanjakan, fisik dibangun, tetapi tujuan belum tercapai.

Selanjutnya Nurul mengatakan, tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adalah dengan dua hal. Pertama memastikan RPJMD telah memuat substansi perumahan dan kawasan permukiman sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Kedua penyelarasan RPJMN dan RPJMD dengan kerangka SDGs dalam sasaran, arah kebijakan, indikator dan kegiatan prioritas.

Dengan menggunakan kerangka SDGs, ada pergeseran indikator dari backlog menjadi target SDGs, yaitu akses terhadap rumah yang adequate, safe, dan affordable. Indikator utama adalah proporsi rumah tangga yang mampu mengakses dan tinggal di rumah layak, berdasarkan ketahanan konstruksi, akses air minum, akses sanitasi, dan luas per kapita. Sedangkan indikator tambahan terdiri dari permukiman kumuh, backlog perumahan, dan keamanan bermukim (lahan).

Sebagai kata akhir, Nurul memberikan motivasi dengan mengajak peserta untuk tidak takut bermimpi dan menjadi bagian dari perubahan. Seperti mimpinya John F Kennedy untuk mengirim orang Amerika mendarat di bulan, mimpi yang seolah mustahil tetapi ternyata bisa terwujud.

# Sambutan Penutupan

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR

Yang terhormat,

Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau yang mewakili dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah Indonesia Barat yang telah selesai Pilkada

Bapak/Ibu Narasumber, fasilitator dan panitia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dan BAPPENAS

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamu alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi bapak/ibu sekalian dalam kegiatan Loklatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2018-2022 bagi daerah yang telah selesai Pilkada. Dalam loklatih selama tiga hari ini, Bapak/Ibu telah berdialog dengan para pejabat eselon 2 anggota Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Nasional serta telah diberikan bekal mengenai teori dan praktik Kerangka Kerja Logis dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.

Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat memperbaiki kualitas dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman terutama dalam perumusan isu strategis, arah kebijakan, sasaran dan strategi, indikator, serta program/kegiatan dan anggaran. Pelaksanaan program/kegiatan diharapkan semakin efektif mengatasi persoalan kekurangan penyediaan rumah beserta prasarana dan sarana dasarnya termasuk pencegahan dan penanganan permukiman kumuh sejalan dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama Goal 6 dan 11. Keselarasan dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah menjadi salah satu kunci dalam percepatan target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di RPJMN terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.

Bapak/Ibu Sekalian, selain meningkatnya kualitas perencanaan, kegiatan ini juga dimaksudkan dapat mendorong kolaborasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Kami berharap Bapak/Ibu yang mengikuti kegiatan ini dari BAPPEDA, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum serta dinas terkait lainnya dapat saling mensinergikan program/kegiatannya dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah termasuk Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah tahunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bersifat lintas sektor dan multi aktor, tidak ada institusi yang bisa menyelesaikannya sendirian. Lebih jauh lagi, kami berharap Bapak/Ibu sekalian dapat memperkuat fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah mengingat sebagian pelaku dari sektor ini adalah bukan pemerintah tetapi masyarakat dan dunia usaha termasuk pengembang dan lembaga keuangan.

Bapak/Ibu sekalian, kami berharap bahwa substansi yang didiskusikan dalam loklatih ini dapat memperkaya materi dan menjiwai penyusunan RPJMD tahun 2018-2022 di wilayah masing-masing dimana perumahan dan kawasan permukiman menjadi urusan wajib pelayanan dasar di daerah. Bapak/Ibu sekalian diharapkan menjadi advokator kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, mampu meyakinkan pimpinan daerah mengenai pentingnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak dalam penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif, sebagai kegiatan pelayanan kesehatan preventif.

Bapak/Ibu sekalian, kami terbuka bilamana dalam proses finalisasi penyusunan RPJMD dan Renstra OPD, Bapak/Ibu memerlukan konsultasi dengan kami di BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri. Kami berharap dalam konsultasi akhir RPJMD dengan Kementerian Dalam Negeri nanti, Bapak/Ibu sekalian telah memiliki draft RPJMD yang sudah sejalan dengan kerangka RPJMN 2020-2024 dan SDGS 2030.

Terakhir, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian sebagai narasumber, peserta dan panitia pada lokalatih ini, dalam ikhtiar mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi kami nyatakan lokalatih ini ditutup. Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 27 November 2018

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman



## PAK MIJAN

Penjual Koran

Tiga tahun sudah Pak Mijan berjualan koran di daerah Blok M.

Ia tinggal berenam bersama anggota keluarga lainnya di sebuah kontrakan yang seharusnya maksimal ditempati oleh tiga hingga empat orang.

Penghasilannya yang tidak seberapa membuat ia tidak dapat memberikan rumah layak untuk kedua anaknya. Sehingga keluarganya sekarang harus membiasakan diri saling berbagi ruang sempit tersebut untuk hidup. Entah sampai kapan.



6 -  
**LAMPIRAN**

# Agenda

| No.                                      | Waktu       | Durasl (menit) | Kegiatan  |
|--|-------------|----------------|---|
| <i>Hari 1 – Minggu, 26 November 2018</i> |             |                |   |
| 1  | 11.00       | -              | Registrasi dan <i>Check in</i> Peserta  |
| 2  | 19.00-19.10 | 10             | Kata Sambutan   |
| 3  | 19.10-19.30 | 20             | Pengantar Lokalatih   |
| 4  | 19.30-21.00 | 90             | <i>Welcoming Dinner:</i>  |
| <i>Hari 2 – Senin, 26 November 2018</i>  |             |                |   |
| 1  | 09.00-09.40 | 40             | <b>Sesi Pembukaan</b>   |
| 2  |             | 5              | <b>Meyanyikan Lagu Indonesia Raya</b>   |
| 3  |             | 5              | <b>Pembacaan Doa</b>  |
| 4  |             | 15             | <b>Pembukaan</b>  |
| 5  |             | 15             | <b>Keynote Speech</b>   |
| 7  | 09.40-12.00 | 160            | <b><i>High Level Discussion</i> Sinergi RPJMN dan RPJMD antara Eselon II Pokja PPAS Nasional dan Kepala OPD</b><br><br><b>Tema Besar:</b><br>Mengapa masih ada rumah tangga di Indonesia yang menempati perumahan dan permukiman tidak layak dan bagaimana langkah ke depan untuk menyelesaikan masalah tersebut? |
| 8  | 12.00-13.30 | 105            | <b>Istirahat, Sholat, dan Makan</b>   |
| 9  | 13.30-14.15 | 45             | Pleno Kebijakan Dasar Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
| 10                                       | 14.15-17.00 | 165            | <b>Sesi Pelatihan I</b><br>Pleno Penyusunan dan Pemanfaatan Data serta Indikator dalam Penyelenggaraan PKP  |
| 11                                       | 17.00-19.00 | 120            | <b>Istirahat, Sholat, dan Makan</b>   |
| 12                                       | 19.00-21.00 | 120            | <b>Berbagi Cerita Sukses</b><br>Inovasi dan Strategi Kota Surabaya dalam Melakukan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan  |
| 13                                       | 21.00       |                | <b>Istirahat</b>  |
| <i>Hari 3 – Selasa, 27 November 2018</i> |             |                |   |
| 1  |             |                | <b>Sesi Pelatihan II–Pleno Pengenalan Metode Penyusunan KKL</b>   |
| 2  | 09.00-10.00 | 60             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan metode Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk penyusunan RPJMD Bidang PKP</li> <li>• Pembagian kelas pelatihan</li> </ul>   |

| No.                                     | Waktu       | Durasi (menit) | Kegiatan   |
|---|-------------|----------------|--|
| 3                                       |             |                | <b>Sesi Pelatihan III-Paralel</b>  |
| 4                                       | 10.00-12.00 | 120            | Praktik Penyusunan KKL Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5                                       | 12.00-13.30 | 90             | <b>Istirahat, Sholat, dan Makan</b>  |
| 6                                       | 13.30-17.30 | 160            | <b>Lanjutan Praktik Penyusunan KKL</b>                                     |
| 7                                       | 17.30-19.00 | 90             | <b>Istirahat, Sholat, dan Makan</b>  |
| 8                                       | 19.00-20.30 | 90             | <b>Presentasi Hasil Penyusunan KKL Pembangunan</b>                         |
| 9                                       | 20.30-21.00 | 30             | <b>Wrap up dan Penutupan</b>   |
| <b>Harl IV – Rabu, 28 November 2018</b> |             |                |  |
| 1                                       |             |                | <i>Check Out</i>   |

# Daftar Peserta

| No. | Nama             | Jabatan                         |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 1   | Ane Carolina     | Bappeda Prov. Jawa Barat        |
| 2   | Afrida Susanti   | PKP Kota Pagar Alam             |
| 3   | Khoerul Anwar    | Kotaku Kota Bekasi              |
| 4   | Ludfi Yudhistira | Bappeda Kab. Probolinggo        |
| 5   | Maman S.         | Bappeda Kab. Kuningan           |
| 6   | Jajat            | PKP Kuningan                    |
| 7   | Purnomo          | Koorkot Kotaku                  |
| 8   | Edismano         | Bappeda Kuningan                |
| 9   | Ramal Ureta      | Bappeda Kota Muara Enim         |
| 10  | Doedi Dores      | Perkim Muara Enim               |
| 11  | Didik K. Sofian  | Bappeda Kab. Magelang           |
| 12  | Wahyu Hernomo    | Dinas PPKP Kab. Magelang        |
| 13  | Yogi K.          | Bappeda Kediri                  |
| 14  | Darwonto         | PUPR                            |
| 15  | Agung            | PKPLH Kudus                     |
| 16  | Widodo Nugiri    | Dinas Perkim Kudus              |
| 17  | Herneli D.       | Dinas PKP Prov. Lampung         |
| 18  | Devi Annisa R.   | PUPR                            |
| 19  | Azhar A.         | Bappeda Kota Bogor              |
| 20  | Tomy             | Kemendagri/ Bangsa/ Fasilitator |
| 21  | Damar Widi       | Program KOTAKU                  |
| 22  | Dendy Kurniadi   | Dit. PKP Ditjen CK              |
| 23  | Mita Dwi Apriani | PKP DJCK                        |
| 24  | Vony F. A.       | Bangda                          |
| 25  | Danil Julio      | Bangda                          |
| 26  | Andika MD        | Perakp Kota Palembang           |
| 27  | Teguh P.         | DPRKP Kota Cirebon              |
| 28  | Dede Kahiyat     | Korkot KOTAKU Bandung           |
| 29  | Romedi N. Bayun  | Kaleid Bappeda Dairi            |
| 30  | Erwin Sitorus    | DPKP Dairi                      |
| 31  | Purnomo WA       | Korkot KOTAKU Bogor             |
| 32  | Nurdin D         | PUPR Kota Subang                |
| 33  | Ismail Firdaus   | PU ab. Lampung Utara            |

|    |                     |                                 |
|----|---------------------|---------------------------------|
| 34 | Bernanrdi Utomo     | BP4D Kab. Subang                |
| 35 | Yuswo Edi           | DPKP Kab. Lampung Utara         |
| 36 | M. Zaffar A, SE     | Bappeda Kab. Bogor              |
| 37 | Selfi H.            | DPKPP                           |
| 38 | Kusumowati          | DPKP Kota Kediri                |
| 39 | Sumiati             | PKP Kota Malang                 |
| 40 | Muara Akti          | Bappeda                         |
| 41 | Medhu HTB           | TAPP SNVT                       |
| 42 | Syaiful Bahri       | Bappeda                         |
| 43 | Sulmarianto         | Dinas PKP Prov. Lampung         |
| 44 | Irin Sobirin        | KOTAKU BOGOR                    |
| 45 | B. Kusnandar        | Bappeda Prov. Jawa Tengah       |
| 46 | Martini             | Perkim Muara Enim               |
| 47 | Deos                | DPKP3 Kota Bandung              |
| 48 | Deden               | Bappeda                         |
| 49 | Wahyu Hernomo       | DPKP Kab. Magelang              |
| 50 | Salmianto           |                                 |
| 51 | Erwin S.            | Bappeda Kota Kediri             |
| 52 | Dade Sarifudin      | KOTAKU                          |
| 53 | Muhammd Yosak       | KOTAKU                          |
| 54 | Edy B. Putrantu     | Bappeda Jawa Timur              |
| 55 | Febri Fitrianingrum | Perumkim Kab. Jombang           |
| 56 | Miduk Hutabarat     | TAPP Pokja Prov. Sumatera Utara |
| 57 | Jeffrey             | Bappeda Kab. Deli Serdang       |
| 58 | Jhon Herry          | DPUPR Kab. Deli Serdang         |
| 59 | Junidar             | DPKP Kab. Deli Serdang          |
| 60 | Sadino              | PUPR Kab. Langkat               |
| 61 | Jumaidi             | Perkim Kab. Muara Enim          |
| 62 | Arif Munandar       | Bappeda Kota Pagar Alam         |
| 63 | Cahaya Sujatmiko    | TAPP Prov. Lampung              |
| 64 | Felisman O.         | Bappeda Kota Tangerang          |
| 65 | Elvi Savitri        | Bappeda Kota Cirebon            |
| 66 | Darwanto            | PU Kab. Kudus                   |
| 67 | Agung               | PKP Kab. Kudus                  |
| 68 | Martini             | Dinas Perkim Kota Bogor         |

# Materi Lokalatih

## 1. Talkshow High Level Discussion

- Penyelenggaraan Kosolidasi Tanah
- Strategi Pembiayaan Perumahan Dalam Mendukung SDGS Goal 11
- Bahan High Level Talkshow Direktur Perkotrumkim Kementerian PPN/BAPPENAS
- Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Dan Rencana Penanganan Kedepan
- Menuju Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni di Daerah

## 2. Kebijakan Dasar Perumahan dan Permukiman

- Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

## 3. Data dan Indikator

- Indikator Perumahan dan Permukiman dalam SDG
- Sistem Informasi Perencanaan Daerah

## 4. Berbagi Cerita Sukses

- Inovasi dan Strategi Kota Bogor Dalam Melakukan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berkelanjutan

## 5. Sesi Pelatihan Penyusunan Kerangka Kerja Logis

- Pengenalan Kerangka Keraja Logis

Materi Lokalatih Wilayah Barat dapat di Scan melalui Barcode atau Download di link berikut :

Link Download Materi : <https://bit.ly/2RA3WLK>



# Video & Materi Advokasi



## LEMBAR FAKTA

**TINGGAL DI RUMAH LAYAK ADALAH HAK ASASI MANUSIA**  
 UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1  
 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

**DIMANAKAH POSISI INDONESIA SEKARANG ?**  
 Hanya 34,24% rumah tangga memiliki akses terhadap rumah layak huni sesuai dengan indikator ketepatan pada tahun 2017. (Olahan Data Susenas, 2017)

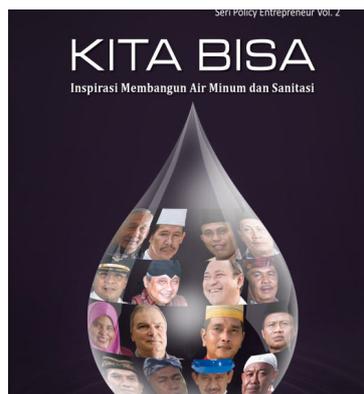
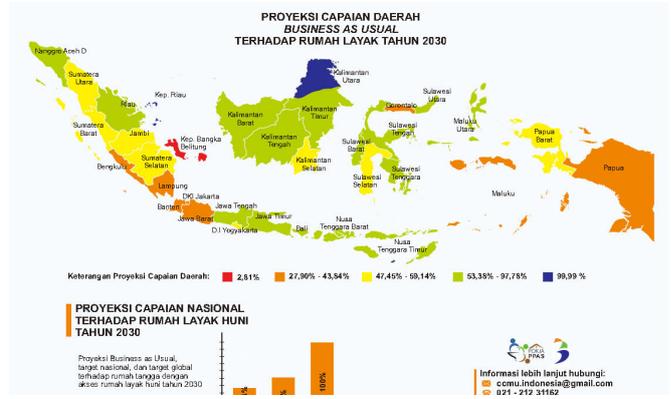
**JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI AKSES TERHADAP RUMAH LAYAK HUNI PER INDIKATOR**  
 40,93% Rumah tangga tinggal di rumah tanpa akses air minum layak  
 32,46% Rumah tangga tinggal di rumah tanpa akses sanitasi layak  
 79,46% Rumah tangga tinggal di rumah dengan ketahanan hunian

### EMPAT INDIKATOR AKSES RUMAH LAYAK HUNI

- Ketahanan bangunan: bahan bangunan atap, dinding dan lantai memenuh syarat (sobagai proxy)
- Akses air minum layak: air minum dari sumber terencana
- Konektivitas ke tempat tinggal: luas lantai per kapita > 2,2 m
- Akses sanitasi layak: fasilitas BAB pribadi/bumama, kloset leher angsa, pembangunan akhir terna di septic tank/SPAL

### POSISI DAERAH DALAM MENJAMIN HAK TERHADAP RUMAH LAYAK HUNI

| Provinsi                  | Rumah Tangga Dengan Akses Rumah Layak Huni | Rumah Tangga Tanpa Akses Rumah Layak Huni |
|---------------------------|--|---|
| Papua                     | 15,20%                                     | 84,80%                                    |
| Nusa Tenggara Timur       | 17,87%                                     | 82,13%                                    |
| Kepulauan Bangka Belitung | 18,01%                                     | 81,99%                                    |
| Bangka                    | 19,91%                                     | 80,09%                                    |
| Lampung                   | 20,00%                                     | 80,00%                                    |
| Banten                    | 24,91%                                     | 75,09%                                    |
| Kalimantan Tengah         | 24,72%                                     | 75,28%                                    |
| Jawa Barat                | 25,07%                                     | 74,93%                                    |
| DI Yogyakarta             | 25,92%                                     | 74,08%                                    |
| Sulawesi Barat            | 26,92%                                     | 73,08%                                    |
| Nanggroe Aceh D           | 30,00%                                     | 70,00%                                    |
| Maluku                    | 31,52%                                     | 68,48%                                    |
| Sulawesi Utara            | 32,13%                                     | 67,87%                                    |
| Sulawesi Selatan          | 32,70%                                     | 67,30%                                    |
| Sulawesi Tengah           | 33,29%                                     | 66,71%                                    |
| Papua Barat               | 33,70%                                     | 66,30%                                    |
| Kalimantan Selatan        | 34,29%                                     | 65,71%                                    |
| Kepulauan Riau            | 34,77%                                     | 65,23%                                    |
| Riau                      | 34,99%                                     | 65,01%                                    |
| Kalimantan Barat          | 35,39%                                     | 64,61%                                    |
| Nusa Tenggara Barat       | 36,30%                                     | 63,70%                                    |
| Sumatera Selatan          | 36,34%                                     | 63,66%                                    |
| Jambi                     | 37,37%                                     | 62,63%                                    |
| Sulawesi Utara            | 37,84%                                     | 62,16%                                    |
| Sulawesi Selatan          | 38,89%                                     | 61,11%                                    |
| Maluku Utara              | 40,44%                                     | 59,56%                                    |
| Sulawesi Tengah           | 40,47%                                     | 59,53%                                    |



**Central Collaboration Management Unit (CCMU) Program KOTAKU  
Jl. Ki Mangunsarkoro No.41 , RT.9/RW.7, Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310**